

Abstrak makalah Simposium Internasional II di Padang.  
Nugroho Wienarto, alamat: Indonesian Office, FAO Programme for Community IPM in Asia, Kemang Timur Raya 59, Jakarta 12730. E-mail: [nugie@attglobal.net](mailto:nugie@attglobal.net)  
Panel: Pengetahuan Lokal dan Global: Implikasinya pada Pengelolaan Sumberdaya Alam.  
Koordinator: Yunita T. Winarto, Semiarto A. Purwanto, dan Ezra M. Choessin  
Perlengkapan: Overhead projector dan slide projector.

## **DARI PENGENDALIAN HAMA KE GERAKAN PETANI: SATU DASA WARSA PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN PETANI**

Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang dimulai sejak tahun 1989 merupakan pengembangan sumberdaya manusia di tingkat petani dan petugas lapangan. Ini berawal dari pelatihan Sekolah Lapangan di lahan sawah petani, kemudian berlanjut dengan kegiatan belajar di kelompok tentang perencanaan, percobaan lapangan terhadap suatu gagasan atau masalah yang ada, maupun pengorganisasian Sekolah Lapangan oleh petani sendiri. Kegiatan pendukung berikutnya adalah tersedianya forum-forum pertemuan di tingkat kecamatan atau kabupaten untuk membahas rencana, hasil-hasil studi dan perkembangan pelatihan petani ke petani. Forum-forum ini berkembang menjadi perkumpulan atau paguyuban petani di tingkat kecamatan, kabupaten hingga propinsi. Kemudian, wakil-wakil petani PHT dari 11 propinsi lumbung beras ini menyelenggarakan musyawarah nasional pada bulan Juli 1999 yang mendeklarasikan berdirinya Ikatan Petani PHT Indonesia (IPPHTI) dengan visi pemberdayaan peran petani dan wawasan pertanian ekologis, serta memiliki misi untuk memperjuangkan hak-hak petani.

Pengalaman empiris menunjukkan, petani kecil di negara berkembang sering menjadi 'korban' hegemoni pihak lain dan mereka berada dalam 'budaya bisu'. Sehingga peran tim bantuan teknik PHT FAO adalah menyiapkan tim Pemandu Lapangan (PL) PHT untuk melatih petani agar mampu berpikir dan bertindak secara kritis, berdasarkan prinsip-prinsip belajar orang dewasa (*andragogy*) dan cara belajar lewat pengalaman (*experiential learning*). Landasan kerja tim FAO adalah teori kritis (*critical theory*) pendidikan, yang terdiri atas tiga kawasan belajar yaitu tentang peningkatan kemampuan kerja dan ketrampilan, peningkatan kualitas hubungan sosial antar petani dan pemberdayaan peran petani. Pola pendekatan pelatihan dan percobaan lapangan oleh petani, dirancang sedemikian rupa agar petani mampu menganalisis data yang mereka kumpulkan sendiri sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam kegiatan ini terjadi interaksi antara pola berpikir ilmiah rasional dengan akumulasi pengetahuan dan pengalaman petani lokal.

Mulai tahun 1998, FAO Community IPM Indonesia, yang merupakan bagian program di 12 negara Asia, berusaha memperkuat organisasi petani, khususnya IPPHTI. Tujuannya adalah agar IPPHTI mampu memperbaharui pola hubungan antara petani dan pemerintah, serta mampu menjadi kelompok pendorong terjadinya perubahan kebijakan yang lebih menguntungkan petani. Program dukungannya antara lain adalah penguatan pengorganisasian sains petani, pelatihan petani dan advokasi lokal, serta penyelenggaraan koran petani bulanan di tingkat nasional. Walaupun di beberapa daerah terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang mendukung rencana petani PHT, tetapi kendala umum yang dihadapi adalah masih kuatnya sistem dan program-program pemerintah yang tidak berpihak kepada petani.

# **DARI PENGENDALIAN HAMA KE GERAKAN PETANI: SATU DASA WARSA PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN PETANI**

Oleh  
Nugroho Wienarto<sup>1</sup>

## **I. Pengantar**

Makalah ini disusun dalam rangka simposium internasional II Jurnal Antropologi Indonesia: Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru pada tanggal 18-21 Juli 2001 di Universitas Andalas, Padang. Tujuan penulisan makalah ini adalah memberikan gambaran umum tentang evolusi program dukungan terhadap kelembagaan petani melalui pengembangan PHT (Pengendalian Hama Terpadu) di Indonesia. Apa yang ditulis di sini, bukanlah karya pribadi penulis, melainkan merupakan rangkuman dari perkembangan pemikiran dan pengalaman para pelaku yaitu petani, pemandu, perancang hingga peneliti yang terlibat dalam program. Mengingat judul topik cukup luas maka penulis mencoba menyajikan hal-hal pokok tentang evolusi atau perkembangan dari bentuk dan sifat dukungan program oleh tim PHT FAO selama sepuluh tahun belakangan ini kepada para petani tanaman pangan dan sayuran di Indonesia.

Pokok bahasan yang ditulis adalah:

- a) Selayang pandang program PHT di Indonesia dan di Asia;
- b) Pendidikan Petani: kerangka pikir dalam mengembangkan program;
- c) Mengorganisir PHT di Masyarakat Petani (Community IPM): langkah-langkah untuk membangun kelembagaan lokal
- d) Refleksi

## **II. Selayang pandang program PHT di Indonesia dan di Asia**

### PHT di Indonesia dan Peran FAO

Walaupun kata PHT sudah tercantum dalam GBHN pada tahun 1970-an tetapi secara pelaksanaannya di lapangan dalam skala besar baru dimulai pada tahun 1989 dalam bentuk Program Nasional PHT yang dikordinir oleh BAPPENAS. Terjadinya ledakan hama wereng pada tahun 1970-an dan 1980-an telah mengancam stok beras nasional. Ledakan wereng tersebut telah dibuktikan melalui penelitian oleh ahli nasional dan internasional disebabkan oleh penggunaan insektisida dari golongan organofosfat, organoklorin dan karbamat yang akhirnya menghasilkan Instruksi Presiden No. 3/86 pada bulan Desember 1986.

Inpres 3/86 menyatakan bahwa PHT merupakan strategi nasional pengendalian hama, melarang 57 jenis insektisida digunakan di tanaman padi dan menginstruksikan agar petani

---

<sup>1</sup> Indonesia Country Officer, FAO Programme for Community IPM in Asia, Jalan Kemang Timur Raya 59, Jakarta 12730, telp. 021-719 8434, 7887; fax. 021-719 8233, 7961; email [nugie@attglobal.net](mailto:nugie@attglobal.net). Web site: [www.communityipm.org](http://www.communityipm.org) dan [www.toxictrail.org](http://www.toxictrail.org)

dan petugas lapangan dilatih dalam penguasaan PHT di lapangan. Lebih lanjut, Pemerintah juga mengurangi subsidi pestisida secara bertahap dari 80% hingga 0% pada tahun 1989<sup>2</sup>.

Program Nasional PHT antara tahun 1989-1993 didukung oleh dana hibah USAID melatih lebih dari 250 ribu petani padi dan sayuran, 10.000 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan 2000 Pengamat Hama dan Penyakit (PHP) di 10 propinsi utama penghasil beras. Propinsi ini adalah Aceh, Sumut, Sumbar, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Latihan petani dilaksanakan melalui model Sekolah Lapangan PHT (SLPHT)<sup>3</sup> yang dilakukan selama 12 kali pertemuan selama 1 musim tanam di lahan petani.

Antara tahun 1993-1999, program nasional PHT dikordinir oleh Departemen Pertanian dan mendapat dukungan dana pinjaman dari Bank Dunia dan dana hibah dari USAID. Komponen program adalah pelatihan petugas dan petani, penelitian terapan, dan pengembangan kebijakan pestisida yang berwawasan lingkungan. Program yang berjalan di 12 propinsi ini (tambahannya adalah Sumatera Selatan dan NTB) telah melatih sekitar sejuta petani melalui program SLPHT dan melahirkan paguyuban-paguyuban petani PHT di tingkat kecamatan, kabupaten maupun propinsi yang melakukan program lokal mereka sendiri. Yang menarik adalah hampir sekitar 40% dari pelatihan petani itu dilakukan oleh petani pemandu, yang merupakan hasil seleksi dari lulusan Sekolah Lapangan. Disamping itu dalam rangka mendukung kelompok SL, diselenggarakan kegiatan-kegiatan, antara lain: Perencanaan partisipatoris, SL tindak lanjut palawija/sayuran, Studi petani. Sedangkan jaringan horisontal mulai terbentuk di tingkat kecamatan, dalam bentuk kegiatan: seminar petani, pertemuan teknis petani, pertemuan perencanaan petani, media lokal, dan di beberapa lokasi terselenggara kegiatan musyawarah petani di tingkat kecamatan/kabupaten/propinsi. Para PL (Pemandu Lapangan) PHT yang berjumlah sekitar 340 orang memiliki kantor kecil di tingkat sub-propinsi dan kabupaten dan merupakan 'urat syaraf' program dalam mendukung kegiatan petani PHT.

Sejak tahun 1995 sudah mulai terbentuk jaringan petani PHT di tingkat kecamatan, yang kemudian berlanjut dalam skala yang lebih besar berupa 'paguyuban-paguyuban' dan pertemuan/musyawah petani di tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi. Pada bulan Juli 1999 para petani menyelenggarakan Musyawarah Nasional Petani PHT di Yogyakarta yang dihadiri oleh 461 petani dan mengikrarkan berdirinya Ikatan Petani PHT Indonesia (IPPHTI)<sup>4</sup>.

Dengan berlangsungnya krisis ekonomi dan politik yang dimulai pada tahun 1997 maka Program Nasional PHT menjadi 'tidak aktif' sejak bulan November 1999.

Kegiatan-kegiatan lapangan para petani PHT sejak itu, tidaklah ditunjang oleh dana pemerintah nasional tetapi oleh dana masyarakat lokal sendiri maupun dukungan terbatas dari pemerintah daerah, LSM dan FAO. Dengan bertumbuhnya organisasi jaringan petani PHT di berbagai tempat, yang ditunjang oleh kegiatan swadaya baik berupa studi lapangan, latihan petani ke petani, pemasaran benih sehat dan produk bebas perlakuan pestisida maupun kegiatan advokasi, maka suara petani di masyarakat makin nyata<sup>5</sup>. Jaringan petani PHT ini

---

<sup>2</sup> Nota Keuangan, Departemen Keuangan, 1980-1989

<sup>3</sup> Russ Dilts, Sekolah Lapangan: Upaya Pembaharuan Penyuluhan Pertanian, Ekstensia, Jakarta, 1995. Makalah ini membahas paradigma dan landasan teoritis dari program pendidikan petani.

<sup>4</sup> --, Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Petani PHT Indonesia, IPPHTI, Yogyakarta, Juli 1999.

<sup>5</sup> Rahmat Hidayat, Melepas Belenggu Ketidakadilan terhadap Petani, Makalah IPPHTI pada Semiloka Corporate Farming "Menentang Revolusi Hijau II" tanggal 30 Oktober s/d 1 Nopember 2000 di Hotel Jayakarta, Yogyakarta.

juga melakukan aliansi dengan Komnas HAM, dan berbagai LSM yang bergerak di bidang pertanian berkelanjutan, lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Secara singkat, model Sekolah Lapangan yang dimulai di Indonesia ini telah diadopsi dan dikembangkan oleh lembaga-lembaga lain baik itu Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP) maupun pemerintah negara-negara lain di Asia dan Afrika. Indonesia telah menjadi model pengembangan PHT di Asia dan Afrika. Di samping itu, model SL ini juga diterapkan oleh beberapa program pemerintah, termasuk Latihan PHT Perkebunan Rakyat yang sedang berjalan di beberapa propinsi di Indonesia. Petani yang dilatih adalah yang membudidayakan tanaman coklat, lada, kopi, teh, kacang mente, dan kapas.

### Perkembangan Program PHT FAO di Asia

Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations terlibat sedari awal dalam pengembangan PHT di Indonesia. Pada tahun 1989-1992 peran FAO adalah selaku lembaga teknis pelaksana program, kemudian pada tahun 1993-1998 FAO beralih peran sebagai lembaga bantuan teknis. Kegiatan utama tim FAO adalah menyiapkan kurikulum pelatihan petugas dan petani, melakukan pelatihan bagi Pemandu Lapangan, serta dampingan maupun pemantauan terhadap pelaksanaan pelatihan. Pada skala terbatas, tim FAO melakukan kegiatan studi ekologi dan rintisan riset aksi petani pada beberapa desa di daerah lumbung beras yang memiliki masalah serangan hama yang cukup berat.

Saat ini ada beberapa negara Asia yang aktif menyelenggarakan program PHT di tingkat petani disamping Indonesia yaitu China, Thailand, Kamboja, Laos, Nepal, Sri Lanka, Filipina dan Vietnam. Perkembangan ini tidak terlepas dari suksesnya penerapan model latihan yang dipelopori oleh Indonesia<sup>6</sup> dan keberadaan program PHT FAO Antar Negara di Asia. Program PHT FAO Asia ini telah dimulai sejak tahun 1980. Sedangkan pada fase ke-empat, tahun 1998-2002, program ini bernama Community IPM in Asia yang mendukung perkembangan PHT di 12 negara, termasuk Indonesia.

Secara ringkas, tujuan dari program PHT FAO pada tahap-tahap yang lalu adalah untuk menciptakan dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia PHT di tingkat petani dan petugas lapangan di tiap negara. Sedangkan fokus program pada fase ke-empat ini adalah membangun PHT di masyarakat, melalui riset aksi/penelitian lapangan, pendidikan, pengorganisasian dan advokasi yang dilakukan oleh dan untuk petani. Kerangka pikir dari Community IPM tersaji di appendix 3.

### **III. Pendidikan Petani: Kerangka Pikir Pengembangan Program**

Konsep pendidikan petani, yang diwujudkan dalam kegiatan Sekolah Lapangan, Studi Lapangan, Advokasi Lokal dan Jaringan petani tumbuh dari akar pendidikan partisipatoris, non-formal dan riset aksi. Para ahli ilmu pengetahuan yang terlibat merumuskan bahwa semua pengetahuan pertanian berasal dari lahan sehingga kembali ke lahan untuk 'menemukan' prinsip-prinsip pengelolaan ekologis adalah sangat perlu.

Kerangka dasar pendekatan pendidikan, yang menjadi dasar dari berbagai metodologi dan teknik, berasal dari taksonomi belajar yang dikemukakan oleh ahli sosiologis Jurgen Habermas.<sup>7</sup> Kerangka belajar ini tidaklah membagi pendidikan menjadi wilayah-wilayah

<sup>6</sup> P.E. Kenmore, Indonesian IPM: A Model for Asia, USAID Regional Meeting, Colombo, Sri Lanka, 1992.

<sup>7</sup> Jurgen Habermas, Knowledge and Human Interests, Boston, Beacon Press, 1971.

‘kognitif, afektif dan psikomotorik’<sup>8</sup>, tetapi membahas tiga kawasan belajar manusia yaitu kerja, hubungan antar manusia, dan kemampuan menguasai faktor-faktor hidup.

**a. Kawasan Kerja:** Setiap orang ingin belajar mengenai pekerjaannya supaya dia dapat lebih efektif atau supaya dia lebih mampu secara teknis. Ciri khas kawasan ini adalah tindakan yang memanfaatkan alat-alat. Alat tersebut bisa alat fisik (misalnya, bajak) atau pengetahuan dan science (pengertian tentang agroekosistem). Termasuk dalam kawasan kerja adalah pengertian sebab-akibat.

Dari kerangka pikir ini muncul visi “Petani sebagai Ahli PHT” yang mendasari pendekatan Sekolah Lapangan. Di sini petani belajar melakukan eksperimen secara independen, menciptakan sarana belajar sendiri, mengelola sebuah ‘laboratorium lapangan’, dan merencanakan kegiatan khusus, seperti ‘Hari Lapangan’. Petani tidaklah merekam sekumpulan ‘pesan’ tertentu tetapi mereka belajar menguasai suatu proses belajar yang dapat diterapkan secara terus menerus dalam situasi yang berbeda. Ilustrasi secara lebih nyata dan lengkap tentang penjelasan tiga kawasan belajar dalam program PHT terdapat pada makalah E. Koswara.<sup>9</sup>

**b. Kawasan Hubungan Antar Manusia:** Setiap orang ingin lebih mampu dalam soal pengertian dan arti proses hubungan sosial. Ia ingin tahu, bagaimana dapat berhubungan dengan orang lain dengan ciri-ciri khas ‘saling memahami’. Ciri khas kawasan ini adalah ‘tindakan komunikatif’ (tindakan atas hubungan). Tindakan komunikatif muncul ketika ada diskusi kelompok dengan adanya saling kepehaman, saling percaya, saling perhatian, dan saling penghormatan diantara setiap anggota kelompok. Diskusi kelompok tidak didominasi oleh siapapun dan menghasilkan kesepakatan tentang tindakan yang ingin dilaksanakan oleh anggota diskusi.

**c. Kekuasaan:** Setiap orang dewasa ingin tahu bagaimana mereka dapat menguasai keadaan yang dihadapi. Keadaan tersebut termasuk faktor dalam (mitos, kepercayaan, psikologi, dll) dan faktor terkait dengan lingkungan (agroekosistem, ekonomi, sosial, dll). Kekuasaan ini tergantung pada kemampuan berfikir secara kritis. Dalam kawasan ini tujuan belajarnya adalah: supaya dapat membedakan antara keadaan yang di luar kekuatan dirinya dengan yang ia ‘percaya’ (asumsi tanpa usaha mencari bukti) di luar kekuasaannya sehingga ruang gerak pemikirannya bisa diperluas. Dalam kawasan ini, petani membahas hambatan dan tantangan di dalam kelompok dan pilihan-pilihan tindakan karena mereka terkait dengan lingkungan ekologis, sosial, politik dan ekonomi yang lebih luas.

Sekolah lapangan hanyalah kerangka awal pendidikan emansipatoris. Sehingga kegiatan SL dan tindak lanjutnya, seperti SL petani ke petani, riset aksi petani/studi lapangan dll. hanyalah ‘sekolah dasar’ dari usaha pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani. Mampu menguasai lahan adalah langkah pertama, tetapi petani segera akan berhadapan dengan berbagai tekanan dan sistem-sistem di luar kendali mereka. Ini memerlukan tindakan-tindakan dalam bentuk yang lain.

---

<sup>8</sup> Benyamin Bloom, Handbook on formative and summative evaluation of student learning, MacGrawHill, New York, 1971.

<sup>9</sup> E. Koswara, Dari ‘Penyuluh-Rekomendasi-Teknologi’ ke ‘Pendamping-Kreativitas-Petani’: Evolusi Peran Petugas Pertanian, Simposium Internasional II Jurnal Antropologi Indonesia, Universitas Andalas, Padang, 2001.

#### **IV. Community IPM (PHT di Masyarakat Tani)**

Walaupun SL sudah dilaksanakan dalam skala besar di mana-mana tetapi ini tidak cukup dalam rangka menjangkau tercapainya inisiatif petani yang berkelanjutan dan pelembagaan PHT pada masyarakat pedesaan. Dari evaluasi dan studi-studi kasus yang kami laksanakan, kami temukan desa-desa, dimana tim petani pemandu telah menjangkau mayoritas masyarakat, sembari mereka memperdalam wawasan PHT. Walaupun demikian, kami juga temukan bahwa di lokasi-lokasi lain, tempat SLPHT berjalan dengan baik, program ini lenyap tanpa bekas. Sehingga kami mulai memperkuat akar program di dalam masyarakat.

##### Program Tindak Lanjut dan Visi PHT

Pada awal 1989, hampir seluruh birokrat yang terlibat dalam program PHT di Indonesia tidak yakin bahwa petani mampu menguasai analisa agroekosistem yang ‘kompleks’. Setelah 208 SLPHT yang pertama berjalan di bulan Januari-April 1990, barulah orang mulai percaya bahwa Petani Mampu menjadi Ahli PHT.

Visi Kedua – Petani sebagai Pemandu. Kami simpulkan bahwa jika petani mampu menguasai proses ‘belajar menemukan sendiri’ di lahannya maka mereka mampu memandu petani lain untuk belajar. SL ‘Petani ke Petani’ muncul secara spontan pada pertengahan tahun 1990. Saat ini sudah lebih dari 25 ribu petani alumni SL yang dilatih menjadi Pemandu dan menyelenggarakan pelatihan bagi petani lain.

Visi Ketiga – Petani Peneliti. Sebagian besar orang percaya bahwa petani sulit melakukan percobaan sederhana. Tetapi, di ratusan lokasi petani saat ini terlibat dalam penelitian ilmiah tentang masalah lokal yang rumit. Para petani sekarang terlibat dalam program-program, yang dulu sering dianggap tidak mungkin, sebagai contoh, memelihara, memperbanyak, menyebarkan dan mengelola agensia hayati<sup>10</sup> (parasitoid, jamur, virus) serta melatih petani lain dalam bidang tersebut. Sekarang, Petani-Petani ‘Peneliti’ PHT sering diundang dalam pertemuan nasional para peneliti PHT untuk mengemukakan program dan hasil penelitian mereka. Perlu disampaikan juga bahwa peneliti-peneliti yang tidak akrab dengan kebebasan, kecerdasan dan ketekunan petani PHT, sering pada awalnya menjadi kaget.

##### Perkembangan PHT di Masyarakat Tani

Walaupun berbagai kegiatan di tingkat petani di atas sangat membantu dalam rangka memperluas wawasan dan memperdalam materi PHT, program nasional PHT antara tahun 1994-1999 hanya mampu menyediakan pilihan kegiatan tindak lanjut di petani dalam skala yang terbatas mengingat keterbatasan dana program pada tingkat nasional dan propinsi.

Visi Keempat Petani Perencana dan Organisator. Mulai tahun 1995, telah berdiri jaringan-jaringan petani PHT yang aktif dan mereka mulai mengambil alih fungsi-fungsi petugas lapangan pemerintah dan LSM. Tetapi fungsi organisator masih dipegang oleh orang luar, kecuali di tingkat desa. Berbagai kegiatan perencanaan sudah dilakukan oleh petani tetapi belum ada usaha untuk memadukan secara bersama-sama jaringan petani yang aktif dalam penelitian ilmiah, pelatihan dan kegiatan lainnya dalam suatu bentuk organisasi yang mantap.

Dalam kerangka Community IPM, kegiatan-kegiatan dikembangkan agar petani terlatih memperoleh peluang dan ketrampilan untuk mengembangkan ‘lembaga-lembaga’ mereka

---

<sup>10</sup> Sy. ST. Rajo Intan dan Yohanes, Pos Informasi dan Pelayanan Agens Hayati (POS IPA): Peranannya dalam Pengayaan Pengetahuan Petani, Simposium Internasional II Jurnal Antropologi Indonesia, Universitas Andalas, Padang, 2001.

sendiri. Sejumlah bentuk forum pertemuan dimulai dengan biaya dari program nasional. Kegiatannya antara lain adalah Pertemuan-pertemuan Perencanaan Petani PHT di tingkat desa dan kecamatan. Para petani yang dilatih dalam metode perencanaan partisipatori mengembangkan rencana kelompok sembari belajar kemampuan merencana melalui interaksi dengan petani-petani lain. Kelompok-kelompok antar masyarakat dan desa dihubungkan ke dalam suatu jaringan sehingga mereka dapat membahas rencana-rencana dan berbagi pengalaman. Petani juga mulai berlatih untuk melakukan ‘pendekatan’ dengan pemerintah daerah dan menerapkan teknik negosiasi. Mereka mengejutkan banyak orang karena mampu menyajikan rencana strategis yang teliti dan rinci, termasuk analisa masalah dan sosial, visi, analisa tujuan, strategi, taktik, dan rencana operasional. Metode-metode yang digunakan antara lain dari ZOPP/Perencanaan Matriks, riset aksi, PRA dll.

Pertemuan Teknis Petani diselenggarakan agar jaringan petani yang terlibat dalam studi lapangan dapat membagi hasil, melakukan kunjungan silang, dan memadukan rencana mereka untuk mengatasi masalah bersama.

Jaringan Petani Pemandu: petani pemandu yang berpengalaman berlanjut menjadi motor di dalam masyarakat. Pelatihan Petani Pemandu baru secara bertahap melibatkan para petani pemandu yang sudah berpengalaman.

Media Petani: pelatihan dan dukungan dana terbatas diberikan kepada jaringan petani PHT yang tertarik mengembangkan dan menyebarkan buletin, brosur, studi kasus, poster dan teater rakyat.

Community IPM, sebagaimana terlihat dalam diagram di appendix 3, membahas tentang kegiatan pengorganisasian sebagai satu dari tiga sudut dari pemberdayaan petani.

Dalam 3 tahun belakangan ini telah muncul visi berikutnya yaitu Petani Perencana Strategis dan Petani Penentu Kebijakan. Ini sejalan dengan periode ‘Reformasi’ di Indonesia, sehingga keterlibatan Petani PHT dalam politik lokal menjadi cukup jelas karena jaringan petani ini merupakan satu dari sedikit lembaga yang mewadahi petani-petani asli.

Hampir semua kegiatan ini difokuskan pada tingkat kecamatan, mengingat kecamatan merupakan titik temu antara berbagai pelayanan pemerintah dan jasa lain (bank, pasar, dsb) dengan masyarakat pedesaan pada umumnya. Desa sering terlalu kecil lingkupnya untuk organisasi petani karena mereka perlu berinteraksi untuk memperoleh akses terhadap berbagai sumber pelayanan di atas.

### Kelembagaan Petani dan Program Dukungan

Keberagaman Lembaga. Berbagai lembaga petani PHT telah bermunculan di berbagai penjuru. Ini bervariasi, mulai dari kegiatan di tingkat desa hingga musyawarah tingkat nasional, yang mengakibatkan, sebagai contoh terbentuknya IPPHTI (Ikatan Petani PHT Indonesia), Ikatan Petani Mandiri Lampung, maupun HPMPL (Himpunan Petani Minang Peduli Lingkungan) di Sumatera Barat, dan lain-lain. Ada yang berbentuk jaringan, dengan pertemuan dan kepengurusan yang bersifat lintas daerah geografis. Yang lain, membentuk lembaga formal, semacam ‘yayasan’ atau koperasi petani. Beberapa organisasi mempunyai hubungan yang dekat dengan pihak pemerintah daerah pada berbagai tingkatan, sedang yang lain lebih terkait pada kekuatan politik atau sosial tertentu.

Dalam dua tahun terakhir ini Community IPM di Indonesia mendukung langsung kegiatan berbagai jaringan organisasi petani PHT. Pertama, dalam bentuk penguatan kapasitas petani dalam mengelola berbagai kegiatan yang berbasis di lapangan. Serangkaian lokakarya dan kerja lapangan dirancang bersama oleh staf FAO dan wakil-wakil pengurus IPPHTI, dalam topik-topik, antara lain Penguatan Sains/Studi Petani, Penguatan Advokasi Petani, Penguatan Sekolah Lapangan Petani, Keswadayaan, Ekologi Tanah. Ini bertujuan untuk menyediakan wadah-wadah, tempat petani saling memperkuat dan ‘memurnikan’ pemahaman dan

pengorganisasian gagasan dan gerakan yang ada, melalui serangkaian diskusi, proses dokumentasi bersama dan kerja lapangan, dengan secara kritis berusaha mempertanyakan kembali antara praktek-praktek yang sudah dan sedang berjalan di berbagai tempat dengan membandingkannya terhadap filosofi, prinsip dan metode yang menjadi dasar berbagai program lapangan itu sendiri (praxis). Metode/teknik yang digunakan antara lain adalah: analisa sosial-struktural, pohon masalah, advokasi, matriks pola pikir, SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman), analisis pasangan terperinci dll.

Secara ringkas, diharapkan falsafah dan pendalaman gerakan PHT oleh Petani di berbagai daerah diharapkan akan makin berkembang diantara para petani secara bersama-sama dalam wadah-wadah organisasi, yang menjadi tempat pengkajian bersama-sama dalam gerakan-gerakan petani yang terorganisir.<sup>11</sup>

Usaha tentang 'pemurnian' gerakan petani PHT ini dilakukan karena ada contoh-contoh di lapangan tentang 'penyimpangan' terhadap falsafah dan visi PHT yang ada.<sup>12 13 14</sup>. Lihat juga appendix 1 tentang paradigma lama dan baru. Pengaruh dan tekanan eksternal yang kuat (contoh: kampanye perusahaan multi nasional pestisida dan benih, termasuk benih transgenik-GMO<sup>15</sup>, Agreement on Agriculture dan TRIPS dari sistem WTO) juga makin menjadi-jadi terhadap program-program dukungan petani selama ini. Patut disampaikan di sini bahwa skala program yang cukup besar di bawah sistem birokrasi yang top-down dan dengan pergantian penentu kebijakan secara cepat<sup>16</sup> selama kurun waktu program nasional berjalan telah memunculkan contoh-contoh inkonsistensi kebijakan pembangunan pertanian itu sendiri, dengan berbagai implikasinya.<sup>17 18</sup>

Kedua, dilakukan pelatihan manajemen dukungan lapangan bagi wakil-wakil pengurus di tingkat jaringan nasional, hingga tingkat kecamatan. Pada program kedua ini tujuannya

---

<sup>11</sup> Kustiwa S. Adinata (komunikasi pribadi).

<sup>12</sup> SK Menteri Pertanian No. 390 tentang Program Nasional PHT tahun 1994: *"PHT merupakan suatu pendekatan ekologis, yang memandang sistem pertanian sebagai suatu sistem yang kompleks dan hidup, tempat manusia berinteraksi dengan tanah, air, tanaman, dan organisme hidup lainnya dalam rangka memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal.... Dalam PHT, Petani menjadi ahli dan merupakan pusat sistem usaha tani sehingga menjadi subyek pembangunan yang mandiri, efisien dan tangguh."*

<sup>13</sup> Yunita T. Winarto, Ezra M. Choesin, Fadli, A. Sri Handayani Ningsih, Susanto Darmono, Satu Dasa Warsa PHT: Berjuang Menggapai Kemandirian dan Kesejahteraan, FAO Community IPM in Asia, Jakarta, 2000.

<sup>14</sup> Kustiwa S. Adinata, Penguatan Sains Petani Sebagai Salah Satu Upaya IPPHTI dalam Memperjuangkan Pemenuhan Hak-Hak Petani, Simposium Internasional II Jurnal Antropologi, Universitas Andalas, Padang, 2001.

<sup>15</sup> PETANI, Media Jaringan Petani Indonesia, edisi 09/Juni2001, IPPHTI-LP2KP, Solo

<sup>16</sup> Selama kurun waktu 1994-2001, Departemen Pertanian mengalami pergantian 5 menteri yaitu Sjarifudin Baharsjah, Yustika Baharsyah, Soleh Solahuddin, M. Prakoso, dan Bungaran Saragih.

<sup>17</sup> Laporan Musyawarah Nasional Petani PHT, 1999 mengungkapkan tentang inkonsistensi kebijakan pelarangan pestisida, ambang ekonomi, permasalahan KUT, munculnya program BIMAS gaya baru yaitu Gema Palagung yang kembali bersandar pada pola paket ala Revolusi Hijau. Menteri M. Prakoso kemudian meluncurkan program Corporate Farming pada awal tahun 2000.

<sup>18</sup> Francis Wahono, Manusia, Alam dan Teknologi demi Kemakmuran dan Kelangsungan Hidup Rakyat: Pertanian Organik sebagai Gerakan Penguatan Hak-Hak Petani, Lokakarya dan Pertemuan Umum Jaringan Kerja Pertanian Organik Indonesia, tanggal 8-10 Oktober 2000, di Lembaga Studi Realino, Yogyakarta.



adalah bagaimana pengurus jaringan mengembangkan kemampuan mendukung kegiatan-kegiatan di tingkat kelompok serta mengembangkan kemampuan untuk mencari dukungan kongkrit dari berbagai pihak. Metode latihannya tetap menggunakan 'daur belajar dari pengalaman', sebagaimana yang sudah diakrabi ketika mengelola program Sekolah Lapangan. Sehingga para petani mengembangkan ketrampilan dan mengasah gagasan atau ide berdasarkan pengalamannya sendiri melalui langkah-langkah: a) mengalami; b) mengungkap pengalaman; c) mengelola/menganalisa; d) menyimpulkan; dan e) menerapkan dalam rangka memperoleh pengalaman baru.

Ketiga adalah program menyediakan dana hibah awal (seed money) bagi proposal dari kelompok/jaringan petani PHT yang sedang mengembangkan organisasinya, seperti musyawarah/kongres petani maupun yang sedang mendalami bidang teknis tertentu, sebagai contoh penelitian tentang hama baru, program lingkungan pedesaan dan PHT di sekolah, dsb.

Keempat adalah program mencoba meningkatkan kemampuan bekerja sama lembaga-lembaga petani ini dengan lembaga-lembaga petani lainnya, lembaga pemerintah maupun LSM yang pro-petani dan ekologi, Komnas HAM dan lain-lain. Tujuannya adalah memperluas hubungan, aliansi dan perspektif gerakan bagi lembaga-lembaga petani PHT.

Kelima adalah dukungan pada pengembangan media advokasi nasional berupa koran PETANI yang terbit bulanan sebagai alat untuk menyampaikan 'suara petani' ke pihak luar.

## V. Refleksi

Munculnya lembaga-lembaga kemasyarakatan petani ini sangat menarik karena ini mencerminkan adanya suatu evolusi dari pemikiran pembangunan. Dengan berkurangnya peran dan sumber daya dari pemerintah pusat dalam pembangunan maka beban 'keberlanjutan' makin bertambah di pihak 'masyarakat penerima manfaat'. Secara konvensional, banyak usaha sering dilakukan untuk memelihara kegiatan (lembaga-lembaga) melalui kegiatan 'partisipatif' yaitu penerima manfaat bertambah bebannya untuk menanggung 'ongkos pembangunan'. Lembaga-lembaga petani ini malahan mulai menuntut kepada sistem yang lebih luas tentang 'keikutsertaan' mereka dalam mengendalikan peran-peran dan program-program dari lembaga pemerintahan dan legislatif serta menuntut akses yang lebih besar terhadap proses alokasi sumber daya.

Kelembagaan masyarakat tani ini juga sangat menarik karena mereka menuntut peran-peran dan pola hubungan yang baru dari pelayanan lembaga-lembaga pemerintah konvensional dan LSM. Hal yang lebih menarik adalah ketika pemerintah berusaha mengambil peran sebagai 'fasilitator' dalam mendukung lembaga-lembaga masyarakat yang baru ini, maka para petugas lapangan (pemandu PHT) haruslah melakukan perubahan perspektif dukungan yang mendasar dengan mempelajari ketrampilan dan pola pendekatan yang baru.<sup>19</sup> Interaksi antara fasilitator luar dan lembaga-lembaga masyarakat petani yang tumbuh ini sangat penting. Di sini ada banyak kontradiksi dan konflik yang terkandung di dalamnya.

*As a point of principle within Community IPM, the training, education, funding, and other opportunities and resources provided do not foresee or proscribe any specific institutional outcome.*<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> E. Koswara, loc. cit. dan Appendix 2 tentang Perubahan Peran Petani dan Petugas Lapangan dalam Perkembangan Program PHT.

<sup>20</sup> Russ Dilts, Facilitating the Emergence of Local Institutions: Reflections from the experience of the Community IPM Programme in Indonesia, Report of the Asian Productivity Organization (APO) Study Meeting on the Role of Institutions in Rural Community Development, Pages 50-65, Colombo, 21-29 September 1998

Tugas bagi organisator luar adalah hanya menyediakan 'alat-alat', metode, ketrampilan, pengalaman dan memberikan kesempatan. Negara ini sudah penuh dengan ribuan cangkang (kulit) organisasi yang kosong dari peninggalan berbagai projek dan program yang sudah usai. Harapan kami adalah organisasi-organisasi petani ini akan bertumbuh berdasarkan kondisi budaya, ekologis, sosio-politik yang ada di tiap tempat. Keputusannya terletak pada para petani sendiri bila mereka ingin berorganisasi, untuk apa dan bagaimana.

Pada saat ini, berbagai bentuk Organisasi Petani PHT sedang tumbuh, berkembang, sekarat, berubah, mandeg, bertumbuh kembali, bercabang dan menghilang. Usaha-usaha yang dilakukan adalah menyediakan wadah agar para Petani Organisator memperoleh kesempatan untuk melakukan dialog analitis melalui program-program yang memungkinkan mereka sendiri melakukan usaha dokumentasi dan analisa, untuk membuat 'peta' tentang perkembangan lembaga-lembaga mereka sendiri dan untuk merumuskan cara-cara memperkuat gerakan mereka.

Banyak tantangan terbentang di depan. Kami tidaklah naif tentang kontradiksi yang ada sebagai bagian 'agen pembangunan' untuk mengarahkan suatu projek menjadi gerakan. Kami juga menyadari bahwa PHT didorong untuk 'melawan arus' yaitu menentang seperangkat kuat kebijakan, praktek-praktek dan sikap-sikap yang konvensional. Dan sebagaimana terjadi dalam suatu program skala besar, terjadi juga variasi yang besar dalam hasilnya. Ada banyak lokasi yang tidak pernah berhenti berkembang untuk selalu mengejutkan kami, sedangkan ada lokasi yang menunjukkan adanya cacat genetik sehingga organisasi masyarakat yang ditampilkan hanyalah berupa tempelan gincu belaka. Apa lagi dengan krisis ekonomi-politik yang masih berat seperti ini, tekanan akan bertambah kepada pemerintah untuk mengubah kebijakan PHT dan kebijakan-kebijakan lain yang menghormati hak petani, kembali ke pola-pola 'lama' karena tekanan kelompok 'private interest' yang masih tetap kuat.

**Appendix 1. Perubahan Peran Petani dan Petugas Lapangan dalam Perkembangan Program PHT<sup>21</sup>**

Fase	Peran Petani	Peran Petugas Lapangan
Latihan Pemandu Sekolah Lapangan  Tindak Lanjut  Pelembagaan	Petani Ahli PHT Pemandu/ Peneliti Organisator	Pemandu Pemandu SLPHT Fasilitator Penghubung

<sup>21</sup> ibid

## Appendix 2: Paradigma Lama dan Baru<sup>22</sup>

Pertanian dan pembangunan pertanian telah berkembang jauh. Matriks di bawah ini membandingkan pendekatan lama dan baru dari pertanian dan pembangunan pertanian. Paradigma baru ini sangat terkait dengan perkembangan PHT di Indonesia. Harapan kami, ini akan membantu pembaca lebih jelas tentang landasan dari pengembangan PHT oleh Petani di Indonesia.

Topik	Paradigma Lama	Paradigma Baru
<i>Konteks Sosial dan Waktu</i>	Konsepsi lama bermula setelah Perang Dunia II, khususnya dalam hal penyebaran pupuk kimia, dan pestisida. Tahun 1960-an, merupakan periode kekurangan bahan pangan, penyebaran paham komunis, dominasi perusahaan multinasional pestisida, dan Revolusi Hijau, yaitu masa ketika berbagai negara berjuang untuk meningkatkan produksi bahan pangan agar dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk. Pada waktu itu, kalangan entomolog dan ahli lingkungan internasional belum menentang kegiatan perusahaan-perusahaan pestisida. Para ahli pemuliaan tanaman sedang meneliti keajaiban dari varietas-varietas yang responsif terhadap nitrogen. Dengan melakukan perencanaan secara 'Top down' maka berbagai rencana yang dirancang dari pusat, langsung dapat diterapkan.	Berbagai konsepsi baru yang muncul sejak akhir 70-an, telah tumbuh subur pada tahun 80 dan 90-an. Kesehatan lingkungan telah dipandang sama pentingnya dengan kesehatan ekonomi. Manusia telah menjadi fokus utama dari usaha pembangunan, yang dipandang sebagai cara untuk menggerakkan perkembangan ekonomi dan dinamika masyarakat. Walaupun Revolusi Hijau telah menunjukkan hasil nyata tetapi telah disadari, perlunya berbagai pemikiran baru tentang pembangunan berkelanjutan, kesehatan manusia, kualitas lingkungan, dan peran serta masyarakat setempat atas kegiatan pembangunan dan perencanaannya. Bila tahun 40-an bisa dipandang sebagai kurun waktu, saat berbagai bangsa bebas dari penjajahan, maka tahun 90-an akan dipandang sebagai waktu, saat individu/masyarakat setempat menjadi subjek, bukan objek pembangunan.
<i>Paket-Paket Teknologi</i>	Paket-paket sangat diperlukan agar dunia pertanian dapat berkembang, tanpa perlu melakukan pelatihan sumber daya manusia skala besar. Masyarakat <i>dimanfaatkan</i> untuk kepentingan terlaksananya pembangunan .....	Paket-paket teknologi tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Para petani berkembang melalui latihan dan atas inisiatif pribadinya. Pembangunan masyarakat akan menggerakkan roda perekonomian .....

<sup>22</sup> Russ Dilts, Kevin Gallagher, Paradigma Lama dan Baru, Program Nasional PHT, Jakarta, 1989

<p><i>Definisi PHT dan Pengambilan Keputusan</i></p>	<p>Semprot sesuai kalender; atau hitung, semprot dan berharap. Awalnya terpaku pada aplikasi pencegahan, lalu hanya terfokus kepada populasi hama di lapangan melalui penetapan Ambang Ekonomi (<i>Economic Threshold Level</i>) yang baku dan nasional. Angka AE didasarkan kepada kondisi lahan di tempat penelitian. Instruksi yang diberikan kepada petani: hitung populasi, bandingkan dengan AE, semprot bila perlu. Hanya mempertimbangkan populasi hama dan perhitungan keuangan secara parsial.</p>	<p>Fokus utama adalah keuntungan bagi petani. Prinsip pertama adalah <i>Peliharalah tanaman sehat</i>, yang resisten terhadap penyakit setempat, dan mampu mengkompensasi serangan hama. <i>Lestarkan musuh alami</i> pembela tanaman sehingga populasi hama tidak merusak tanaman, merupakan prinsip kedua. <i>Amati dan analisis kondisi lahan secara mingguan</i> merupakan prinsip ketiga. Faktor-faktor yang harus diperhatikan di dalam analisis, antara lain adalah: kondisi tanaman, gulma, tikus, serangga hama dan musuh alami, serta kemampuan produksi dari varietas tanaman. Pengambilan keputusan didasarkan kepada pertimbangan berbagai faktor: kesehatan/kemampuan kompensasi tanaman, populasi hama, populasi musuh alami, analisis potensi kehilangan hasil, biaya pengendalian, harga komoditi, kondisi ekonomi di tingkat petani, dan pengalaman petani sebelumnya. Berbagai angka ambang telah diganti dengan "metode-metode analisis ekosistem".</p>
<p><i>Pestisida</i></p>	<p>Mutlak perlu dalam rangka meningkatkan hasil. Masih sering dikaitkan dengan penggunaan pupuk kimia dan varietas unggul. Pestisida merupakan bagian tak terpisahkan dalam paket-paket teknologi.</p>	<p>Hanya merupakan salah satu cara pemecahan walaupun akan menimbulkan berbagai masalah baru (sebagai contoh, resistensi dan resurgensi wereng coklat). Keputusan untuk pengendalian ditetapkan oleh petani, melalui "analisis ekosistem".</p>
<p><i>Sampling</i></p>	<p>Merupakan metode statistik efisien, yang dipungut dari pelaksanaan di lahan pertanian skala besar. Sebagai contoh adalah <i>sequential sampling</i>.</p>	<p>Sistemnya didasarkan kepada pengalaman, dengan cara penaksiran yang cocok untuk lahan kecil serta memadai untuk berbagai kondisi dengan variabilitas tinggi. <i>Sampling</i> harus dilakukan dari satu petak ke petak lainnya, untuk mengatasi perbedaan setiap kondisi lahan dan manajemen usaha tani.</p>
<p><i>Pupuk Kimia</i></p>	<p>Diperlukan untuk meningkatkan hasil. Harus disubsidi agar produksi yang tinggi dapat dipertahankan. Merupakan bagian integral dari paket-paket teknologi.</p>	<p>Diperlukan untuk meningkatkan hasil tetapi seharusnya digunakan menurut <i>kebutuhan</i> dan perlu dikombinasikan dengan metode-metode untuk memelihara kesuburan tanah. Beberapa pupuk kimia yaitu P dan K tidak selalu perlu dipakai dalam jumlah banyak dan terus menerus. Sedangkan pupuk N sangat penting untuk menunjang produksi yang tinggi. Pupuk organik seharusnya dipakai untuk meningkatkan kualitas tanah dan meningkatkan jumlah <i>micronutrient</i>.</p>

<i>Varietas Unggul Tahan Hama</i>	Diperlukan untuk meningkatkan produksi, tanpa pelatihan bagi petani. Bibit tersebut termasuk dalam paket, bersama-sama dengan pestisida dan pupuk, dalam rangka mencapai tingkat produksi yang diharapkan.	Varietas unggul yang responsif terhadap N dan memiliki banyak anakan, akan mampu mengkompensasi kerusakan yang diakibatkan oleh serangan hama dan penyakit. Varietas-varietas baru memiliki kemampuan kompensasi yang lebih baik. "Resisten" hanya terbatas pada beberapa penyakit dan serangan hama tertentu. Pada dasarnya, setiap serangga di lahan dapat terkendali secara alami.
<i>Pengetahuan tentang Hama dan Musuh Alami</i>	Terlalu rumit. Petani tidak mampu mengambil keputusan atas situasi yang kompleks.	Pengetahuan ini akan mudah dikuasai petani melalui pelatihan sederhana karena mereka sudah pernah melihat hama dan musuh alami di sawahnya selama bertahun-tahun. Lebih dari itu, para petani mampu melakukan analisis agroekosistem dalam rangka mengambil keputusan tentang pengelolaan lahannya.
<i>Petani sebagai Optimizer</i>	Tidak mungkin! Segala sesuatu harus dikerjakan melalui suatu paket teknologi yang direncanakan dari pusat.	Mampu! 10 juta petani akan mampu mengoptimalkan sumberdaya di lingkungan mereka. Ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penyampaian paket yang dirancang dari pusat.
<i>Petani sebagai Pemandu</i>	Harus menggunakan pelatihan sistem Latihan dan Kunjungan (laku), yang dirancang secara 'top-down'. Para penyuluh lapangan menyampaikan pengetahuan/teknologi yang perlu diterapkan kepada petani. 'Pesan' ini merupakan bagian dari paket yang telah dirancang dari pusat.	Petani mampu untuk melatih petani-petani lainnya karena ' <i>pesan</i> ' yang disampaikan adalah proses latihan itu sendiri. Para petani belajar dalam kelompok-kelompok, saling mengasah pengetahuan dan ketrampilan. Mereka belajar di lahan untuk meningkatkan ketrampilan analisis atas kondisi lahan, dengan bantuan petugas lapangan PHT. Kondisi lahan setempat akan menentukan arah dan topik-topik latihan.
<i>Penelitian</i>	Teknologi dikembangkan di pusat-pusat penelitian, yang kemudian disampaikan kepada para perencana penyuluhan. Para perencana ini, kemudian akan menyalurkan teknologi tersebut melalui berbagai jenjang pelatihan bagi aparat sehingga akhirnya sampai kepada petani, melalui sistem LaKu. Petani dan petugas penyuluh merupakan penerima paket yang pasif dari teknologi yang sudah dikembangkan. Kadang-kadang, paket-paket hasil penelitian merupakan "daftar menu" yang harus dipilih oleh petani.	Penelitian dikerjakan pada berbagai tingkatan. Pusat-pusat penelitian tetap menjalankan berbagai penelitian dasar dan mengembangkan proses pengujian, yang akan diterapkan di berbagai tempat untuk memeriksa kesimpulan hasil penelitian dan memulai studi-studi di tingkat lokal. Berbagai studi dicobakan di lahan-lahan setempat, antara lain: uji varietas, uji pemupukan, metode sampling, <i>exclusion</i> atas musuh alami, dan penelitian lainnya. Tidak hanya daftar studi di pusat penelitian yang akan mempengaruhi kegiatan studi di berbagai lokasi tetapi sebaliknya, rencana penelitian di berbagai tempat juga akan menentukan daftar aktivitas di pusat penelitian.

*Evaluasi  
Pelatihan*

Hasil-hasil pelatihan dievaluasi dengan tolok ukur, seberapa jauh adopsi petani terhadap suatu paket. Contoh: Apakah "pesan-pesan" telah diterima? Apakah para petani sudah menghitung 20 rumpun?. Penyerapan secara menyeluruh dari apa saja yang sudah digariskan di kantor pusat perencanaan penelitian atau penyuluhan, akan dinilai sebagai suatu kesuksesan. Hasil-hasil evaluasi akan menentukan apakah petani-petani tersebut sudah "maju", "menyerap", atau "mampu".

Hasil pelatihan seharusnya adalah proses menyesuaikan dan memadukan berbagai ide dan metode baru, yang disajikan selama latihan. "Latihan" itu sendiri, sebenarnya adalah pengujian oleh petani terhadap berbagai metode dan teknologi baru yang disarankan oleh pusat-pusat penelitian. Hasil evaluasi seharusnya adalah seberapa jauh petani dapat memadukan ide-ide dan metode-metode tersebut, beserta hasil-hasil yang mereka peroleh. Informasi ini perlu dikembalikan kepada para peneliti dalam rangka memperbaiki agenda penelitian di masa yang akan datang. Hasil-hasil evaluasi akan menentukan apakah penelitian yang telah dilakukan "bermanfaat", "tepat guna", atau "dapat diterapkan".

*Penyesuaian  
di Masa  
Depan  
terhadap  
Teknologi  
Baru*

Memerlukan suatu paket pesan dari pusat yang dikirimkan melalui penyuluh lapangan kepada para petani melalui sistem LaKu.

Petani mampu menciptakan teknologi dan proses-proses baru di tingkat lokal, dan mampu mengevaluasi teknologi baru tersebut.



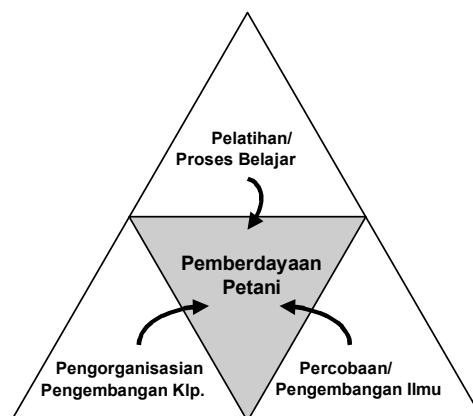


### Appendix 3: Apakah Community IPM (PHT di Masyarakat) itu?<sup>23</sup>

▲ **Community IPM** terkait erat dengan petani yang mengorganisir dan melaksanakan kegiatan PHT-nya sendiri. Ini mengenai petani yang menjadi pengelola aktif, bukan hanya penerima. Ini mengenai aksi kelompok yang menerapkan konsep agro-ekologis untuk menganalisis masalah, merancang studi lapangan dan melakukan percobaan. Ini mengenai petani yang bergabung bersama untuk mempromosikan dan melestarikan cara bertani yang mereka yakini lebih sehat dan lebih efisien.

▲ **Community IPM** telah bertumbuh dari program pelatihan yang dikelola lembaga-lembaga pemerintah dan LSM di berbagai negara Asia. Para lulusan Sekolah Lapangan Petani sendiri yang memutuskan untuk merancang dan mengelola kegiatan PHT mereka sendiri. Petugas-petugas dari lembaga pemerintah dan LSM sekarang mempunyai peran baru untuk mendukung para petani yang sedang mengelola program PHT mereka.

▲ Ada tiga unsur dasar dari **Community IPM** yang digambarkan melalui diagram segi tiga disamping. Hampir semua kegiatan Community IPM melibatkan paling sedikit dua unsur dasar ini. Tiga unsur ini secara bersama-sama berperan menunjang pemberdayaan petani. Dengan mengutip kalimat dari seorang petani pemandu dari Indonesia, kegiatan PHT ini telah membantu petani untuk *“berpikir dan mengandalkan diri sendiri ... melakukan pengamatan lahan sendiri, membuat penemuan sendiri, membuat keputusan sendiri dan menerapkan keputusan tersebut.”*



▲ Contoh-contoh kegiatan **Community IPM** di bidang pelatihan adalah: Sekolah Lapangan yang diselenggarakan oleh Petani Pemandu; materi PHT menjadi bagian kurikulum sekolah lokal; PHT menjadi bagian program belajar membaca dan menulis di desa.

▲ Contoh-contoh kegiatan yang terkait dengan percobaan lapangan adalah: studi kebun serangga dan kompensasi tanaman dikelola oleh petani sebagai bagian dari Sekolah Lapangan yang diprogramkan Pemerintah atau LSM; studi-studi lapangan yang dikelola dan dilaksanakan oleh kelompok tani alumni SL; riset aksi petani yang mencakup serangkaian studi yang dilakukan oleh petani PHT selama beberapa musim.

▲ Contoh-contoh dari kegiatan pengorganisasian adalah: kelompok-kelompok petani PHT; jaringan, asosiasi, musyawarah, rapat kerja dan kongres petani; pertemuan perencanaan dan teknis yang diorganisir petani; advokasi petani, dan penggalangan dana dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung gerakan di masyarakat.

▲ **Community IPM** dimulai dari petani padi Asia yang ingin memecahkan masalah hama, tetapi kemudian berkembang ke beberapa arah. Tanaman lain, seperti sayuran, jagung, kedelai, kapas, coklat dan teh juga telah menjadi sasaran pelatihan dan percobaan lapangan yang dikelola oleh petani PHT. Permasalahan lain, seperti kesuburan tanah, manajemen air dan pemasaran, juga menjadi sama atau lebih penting dibanding masalah hama. Terakhir, Community IPM tidak hanya berlangsung di Asia. Sebagai hasil kunjungan dari para petugas teknis dan pengambil kebijakan maka kegiatan Sekolah Lapangan sudah mulai berkembang di sejumlah negara di Afrika, dan Timur Tengah.

<sup>23</sup> FAO Programme for Community IPM in Asia: Briefing Document, Jakarta, 1998.